

**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO DALAM MENANGANI
PERMOHONAN EKSEKUSI SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN BANK BUKOPIN
SYARIAH CABANG SURABAYA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :
DEWI MARHAR YANTI
NPM. 0771010101

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2010**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT serta Shalawat dan Salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayahNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Disini peneliti mengambil judul: ” *Kewenangan Peradilan Agama Sidoarjo dalam menangani permohonan Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya*”.

Penyusunan skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Disamping itu dapat memberikan hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu dalam mengadakan penelitian dalam mengadakan penelitian guna penyusunan Skripsi.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan dorongan oleh beberapa pihak. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Haryo Sulistiyantoro, S.H., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan Selaku Dosen Pembimbing Utama.
3. Bapak Subani, S.H., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Wiwin Yulianingsih, S.H., M.kn Selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pembuatan skripsi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak H. Muchals Ni'am, SH. M.Hum selaku Panitera Sekertaris Pengadilan Agama Sidoarjo yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
7. Bapak Sariyanto selaku Kepala Bagian Tata Usaha beserta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
8. Kedua orang tua tercinta, Papa, Mama, Mbak Nevy, Adik Yudo tersayang dan seluruh saudara-saudara yang telah memberikan dukungan moriil maupun materiil serta doa dan restunya selama ini.
9. Ucapan terimakasih buat yang tersayang Trinova Laksana yang selalu memberikan motivasi.
10. Teman-teman seperjuangan Puji, Renni, Rina, Tian, Ndower, Erick, Mbak Ita dan seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun peneliti harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan sehingga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, November 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI ..	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN REVISI PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAKSI	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Kajian Pustaka	9
1.6 Metodologi Penelitian.....	22
1.7 Sistematika Penelitian.....	27

BAB II KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN

PERKARA EKONOMI SYARIAH

2.1 Ruang lingkup kewenangan peradilan agama di bidang Bank Syariah meliputi semua perkara Perbankan Syariah di bidang perdata	31
2.2 Sengketa antara Bank Syariah dengan Pihak Non-Islam.....	32
2.3 Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah melalui Arbitrase.....	33

2.4 Asuransi Syariah (<i>Takaful</i>)	38
2.5 Pasar Modal Syariah	46
2.6 Reksadana Syariah	48
2.7 Pengadaian Syariah	48
2.8 Dana Pensiun	51

BAB III PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 DALAM PELAKSANAAN PERMOHONAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

3.1 Prinsip-prinsip Operasional Bank Syariah.....	55
3.2 Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah	58
3.3 Kegiatan-Kegiatan yang Dilarang Bagi Bank Syariah	60
3.4 Bank Syariah Tidak Menerapkan Sistem Bunga	61
3.5. Pembiayaan dalam Perbankan Syariah dengan menggunakan Prinsip Jual Beli	62
3.6 Penerapan UU No. 21 Tahun 2008 dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan	65

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	74
4.2 Saran	75

DAFTAR PUSTAKA	76
-----------------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :Surat Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan

Lampiran 2: Berita Acara Sita Eksekusi

Lampiran 3: Penetapan

Lampiran 4: Akta Pemberian Hak Tanggungan

Lampiran 5: Sertifikat Hak Tanggungan (SHT No. 4032/2005)

Lampiran 6: Sertifikat Hak Tanggungan (SHT No. 6051/2005)

Lampiran 7: Turunan Pengakuan Hutang

Lampiran 8 : Turunan Akta Akad Jual beli Al- Murabaha No. 8

Lampiran 9 : Surat Keterangan Penelitian

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Dewi Marhar Yanti
NPM : 0771010101
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 15 Juni 1989
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO DALAM MENANGANI
PERMOHONAN EKSEKUSI SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN
BANK BUKOPIN SYARIAH CABANG SURABAYA**

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah dan mengetahui penerapan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam menyelesaikan perkara permohonan Eksekusi Hak Tanggungan. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu Penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundangan. Sumber data diperoleh dari literatur-literatur, perundang-undangan yang berlaku dan data dari Pengadilan Agama Sidoarjo tentang Ekonomi syariah. Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian yang dapat di simpulkan adalah ruang lingkup peradilan agama dalam bidang ekonomi syariah beserta dan penyelesaian perbankan syariah di peradilan agama harus mengikuti prinsip-prinsip yang sesuai dengan UU Perbankan Syariah.

Kata Kunci : Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Hak Tanggungan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ahmad Rafiq mengungkapkan istilah hukum merupakan Istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *Al-Fiqh Al-Islamy*, istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat digunakan *Islamic Law*. Dalam Alquran maupun As-Sunnah, istilah *Al-Hukm Al-Islam* tidak dijumpai, yang digunakan adalah kata syariat yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fikih.¹

Pada mulanya kata syariah meliputi aspek ajaran agama, yakni akidah, syariah (hukum), dan akhlak. Ini terlihat pada syariat setiap agama yang diturunkan sebelum islam. Karena bagi setiap umat, Allah memberikan syariat dan jalan yang terang (QS. Al-Maa'idah (5) ayat 48). Mahmud Syaltut dalam bukunya *Al-Islam 'Akidah wa Syariah* mendefinisikan syariah adalah peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungan, dan dengan kehidupan.²

Gemala Dewi mengungkapkan bahwa keberadaan Komite Fatwa Perbankan Syariah yang bertugas untuk menerbitkan fatwa-fatwa atau opini mengenai produk-produk jasa Perbankan Syariah yang keanggotaan dari komite tersebut dipilih dan ditetapkan oleh Bank Indonesia sendiri yang akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bank Indonesia. Di samping itu, diatur

¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 6, 2003, h. 3

² Mahmud Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah Wa Syariah*, Mesir: Dar Al-Qalam, 1966, h. 12

juga mengenai Jaring Pengaman Sistem Perbankan Syariah yang tunduk pada undang-undang mengenai jaring pengaman sektor keuangan (*financial safety net*).³

Farida Prihantini mengungkapkan bahwa pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.⁴

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen menentukan dalam pasal 24 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁵

Selain itu Peradilan Agama termasuk juga salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Musthofa mengungkapkan bahwa Kompetensi (wewenang) Peradilan Agama terdiri atas kompetensi relative dan kompetensi absolute. Kompetensi

³ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 250

⁴ Farida Prihantini dkk., *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta: Papan Sinar Sinanti & FHUI 2005, h. 135

⁵ Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang telah Di Amandemen I, II, III, IV, Appolo, Surabaya.

absolute adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (Hukum Materi).⁶

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam. Adanya ketentuan tersebut dan dipertegas dengan ketentuan beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, selanjutnya berbunyi sebagai berikut :⁷

Pasal 1 Menyatakan bahwa :

- 1) Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang –orang yang beragama islam
- 2) Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dilingkungan Peradilan Agama.
- 3) Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Agama dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama.
- 4) Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Nikah pada Kantor Urusan Agama.
- 5) Juru Sita atau Juru Sita Pengganti adalah Juru Sita dan Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Agama.

Pasal 2 :

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang bearagama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 49 ayat (1) :

⁶ Musthofa, Sy, *Kepaniteraan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 9

⁷ Team Media, *Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Media Centre, h. 14

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, antara orang-orang yang beragama islam di bidang :

- a. perkawinan;
- b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam;
- c. wakaf dan shadaqoh.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (selanjutnya disingkat dengan UU No. 7 Tahun 1989) jelaslah bahwa kini berlaku asas personalitas keislaman,⁸ asas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Selanjutnya disingkat UU Peradilan Agama). Walaupun subyeknya tidak beragama islam maka penyelesaiannya tetap di Pengadilan Agama. Hal tersebut terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara orang-orang beragama Islam Tingkat I, meliputi :

- 1) Perkawinan
- 2) Waris
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infak
- 8) Shodakoh

⁸ Sulistyono, *Handout Mengenai Azas Peradilan Agama*, dalam mata kuliah Hukum Peradilan Agama h. 4

9) Ekonomi Syariah

Perubahan yang nampak dan signifikan adalah masuknya perkara ekonomi syariah dalam lingkup kewenangan Peradilan Agama yang sebelumnya tidak termasuk dan diselesaikan sendiri berdasarkan lembaga-lembaga yang membawahnya di luar Peradilan Agama, yang sebelumnya kewenangan peradilan agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut termasuk pelanggaran atas undang-undang tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syariah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang *jinayah* berdasarkan *qanun*. Berdasarkan Pasal 49 UU Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah merupakan langkah yang tepat dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat muslim yang sebagian besar dianut oleh masyarakat Indonesia.

Penataan di bidang kekuasaan kehakiman dimulai dengan diubahnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang kini kembali diganti menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Selanjutnya disingkat UU Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa:

- 1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- 2) Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan pengaturan di atas berarti bahwa dilakukan penyatuan seluruh badan peradilan menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung, yaitu yang semula Departemen Agama untuk Peradilan Agama, dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia untuk Peradilan Militer, kini disatukan dibawah naungan Mahkamah Agung.

Penggantian dan perubahan kedua Undang-Undang tersebut secara tegas telah mengatur peralihan organisasi, administrasi, dan finansial, dari semua lingkungan peradilan ke Mahkamah Agung termasuk yang ada di lingkungan Peradilan Agama yang sebelumnya masih berada dibawah Departemen Agama berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 juga dialihkan ke Mahkamah Agung. Untuk memenuhi ketentuan tersebut perlu pula diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Untuk itulah pada tanggal 20 Maret 2006 diundangkanlah UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Persoalannya sampai saat ini belum ada aturan hukum positif yang secara terperinci mengatur tentang hukum acara penyelesaian sengketa ekonomi syariah, namun demikian bukan berarti tidak ada aturan hukumnya

atau dengan kata lain telah terjadi “kekosongan hukum” dalam persoalan ini. Karena pada dasarnya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili. Oleh karena itu walau pun aturan formal yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah belum ada, pengadilan agama sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh negara untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sudah seharusnya mengerahkan segenap potensinya untuk menjawab tantangan tersebut.

Untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini kiranya pengadilan agama harus berani dan mampu menggali nilai-nilai maupun norma-norma hukum Islam, baik yang terdapat dalam kitab Al-Qur'an, al-Sunnah maupun kitab-kitab *fiqh /ushul fiqh* serta fatwa-fatwa Majelis Ulama' yang dalam hal ini melalui Dewan Syariah Nasional yang berkaitan dengan persoalan-persoalan diseputar ekonomi syariah.

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang tersebut, maka pembahasan dalam Skripsi yang berjudul “ ***Kewenangan Peradilan Agama Sidoarjo dalam menangani permohonan Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan Bank***

Bukopin Syariah Cabang Surabaya “, akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah ?
- 2) Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pelaksanaan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk :

- 1) Mengetahui tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara-perkara ekonomi syariah.
- 2) Mengetahui bagaimana penerapan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam menyelesaikan perkara Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan .

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya terkait mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam penanganan Ekonomi Syariah.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi informasi konkrit bagi usaha pembaharuan hukum perdata khususnya bagi hakim, pengacara, pengugat, ketika mengajukan upaya eksekusi Hak Tanggungan.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menangani Perkara-Perkara Ekonomi Syariah

Kompetensi (wewenang) Peradilan Agama terdiri atas kompetensi absolut. Kompetensi Absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materi). Kompetensi relative peradilan agama merujuk pada 118 HIR atau 142 Rbg jo. 66 dan Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama berdasarkan pada ketentuan Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989, yaitu acara yang berlaku pada lingkungan peradilan agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum.

Pasal 118 ayat (1) HIR menganut asas *actor sequitur forum rei* (bahwa yang berwenang adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat). Namun, ada beberapa pengecualian, yaitu yang tercantum dalam Pasal 118 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), yaitu sebagai berikut.

- 1) Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan yang diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal Penggugat.
- 2) Apabila tempat tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal Penggugat.
- 3) Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada peradilan di wilayah hukum di mana barang itu terletak.
- 4) Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.⁹

Berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, hanyalah mengenai perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqoh saja. Perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang bersifat individual yaitu perkara yang hanya menyangkut hubungan perorangan saja. Kewenangan Pengadilan Agama yang semacam ini berlangsung selama kurun waktu dari tahun 1989 sampai tahun 2006, sehingga bisa dikatakan Pengadilan Agama terbiasa menangani perkara-perkara yang bersifat

⁹ R. Soesilo, RIB / HIR, Politeia, Bogor. 1995, h. 76

individual semacam ini. Sedangkan kita ketahui bahwa perkara ekonomi syariah tidak hanya bersifat individual tetapi menyangkut berbagai pihak. Selain itu ekonomi syariah bukan hanya sekedar perbankan dan asuransi syariah saja yang sudah dikenal masyarakat luas selama ini, tetapi ekonomi syariah lebih luas lagi ruang lingkungannya yaitu menyangkut segala hal selama hal itu dikelola berlandaskan aturan dan etika syariah.

Dalam Pasal 50 UU No. 3 Tahun 2006 ditentukan, bahwa pengadilan agama berwenang untuk sekaligus memutus sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindarkan upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya segketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama. Sebaliknya, apabila subjek yang mengajukan sengketa hak mililk atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di pengadilan agama ditunda untuk menunggu ke pengadilan di lingkungan peradilan umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke pengadilan agama bahwa telah didaftarkan gugatan di pengadilan negeri terhadap

objek sengketa yang sama di pengadilan agama. Dalam hal objek sengketa yang diajukan keberatannya, peradilan agama tidak perlu menangguhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait.

1.5.2 Ekonomi Syariah

Pengertian Ekonomi syariah berdasarkan penjelasan Pasal 49 UU Peradilan Agama adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, re-asuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pengadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Menurut pendapat H. Muchlas Ni'am, selaku panitera sekertaris di Pengadilan Agama Sidoarjo, bahwa ekonomi syariah adalah Suatu kegiatan dimana debitur melakukan pinjaman di suatu bank syariah dan terjadi *wan prestasi* sehingga terjadi suatu sengketa antara kedua belah pihak tersebut, apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan melalui cara arbitrase ,maka sengketa tersebut baru bisa didaftarkan di Pengadilan Agama.¹⁰

¹⁰ Wawancara dengan H. Muchlas Ni'am selaku Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 31 Agustus 2010

Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 15 ayat (2) bahwa pengadilan syariah islam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

1.5.3 Penyelesaian Sengketa Bank Syariah dan Nasabahnya melalui Perdamaian atau yang dikenal ADR (*Alternative dispute Resolution*)

Penyelesaian sengketa bisnis melalui mekanisme ADR dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli atau melalui mekanisme arbitrase, banyak dipilih oleh para pihak yang berselisih karena beberapa alasan, diantaranya: kesukarelaan dalam proses, prosedur cepat, rahasia (*confidential*), hemat waktu, hemat biaya, keputusan non yudisial, fleksibel dalam merancang syarat-syarat penyelesaian sengketa, *win-win solution*, tetap terpeliharanya hubungan baik antar pihak yang bersengketa Para Arbiter adalah orang-orang yang memiliki keahlian (*expertise*) dan putusan arbitrase bersifat final serta mengikat para pihak. Selain itu tidak ada kemungkinan banding dan kasasi terhadap putusan arbitrase.

1.5.4 Penyelesaian Sengketa Bank Syariah dan Nasabahnya Melalui Arbitrase

Hal-hal yang berkaitan dengan prosedur dan proses penyelesaian sengketa lembaga keuangan syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional biasa disingkat dengan (Basyarnas) harus didasarkan dengan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Peraturan Prosedur Basyarnas. Adapun ketentuan-ketentuan umum yang terkait prosedur penyelesaian sengketa UU No. 3 Tahun 1999 sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan sengketa harus diajukan secara tertulis, namun demikian dapat juga secara lisan apabila disetujui para pihak dan dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbiter.
- 2) Arbiter atau Majelis Arbiter terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara pihak yang bersengketa.
- 3) Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak Arbiter atau Majelis Arbiter terbentuk, namun demikian dapat diperpanjang apabila diperlukan dan disetujui para pihak.
- 4) Putusan arbitrase harus memuat kepada putusan yang berbunyi “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” nama singkat sengketa, uraian singkat sengketa, pendirian cara pihak,

nama lengkap, dan alamat Arbiter, Pertimbangan dan kesimpulan Arbiter atau Majelis Arbiter mengenai keseluruhan sengketa, pendapat masing-masing Arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam Majelis Arbitrase, amar putusan, tempat dan tanggal putusan, dan tanda tangan Arbiter atau Majelis Arbiter.

- 5) Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan.
- 6) Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan harus ditutup dan ditetapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup.
- 7) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Arbiter atau Majelis Arbiter untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan

Ketentuan-ketentuan prosedur di atas dimaksudkan untuk menjaga agar jangan sampai penyelesaian sengketa melalui arbitrase termasuk juga arbitrase syariah menjadi berlarut-larut, sehingga dengan demikian dalam arbitrase tidak terbuka lagi upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis selain ADR dan Arbitrase syariah dapat pula melalui jalur peradilan agama. Berdasarkan revisi UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tanggal 26 Maret 2006 yang kemudian menjadi UU No. 3 Tahun 2006 yang sekarang ini kewenangannya diperluas dalam bidang Lembaga Keuangan Syariah meliputi: perbankan syariah, asuransi, dana pensiun syariah, obligasi syariah, dan seterusnya.

1.5.5 Eksekusi

Secara etimologis eksekusi berasal dari bahasa belanda yang berarti menjalankan putusan hakim atau pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan putusan (*tenuitvoer lengging van vonnissen*) secara terminologis eksekusi ialah melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu putusan yang bersifat *condemnatoir*, sedangkan putusan yang *declaratoir* dan *constitutive* tidak memerlukan eksekusi dalam menjalakkannya.¹¹

Permohonan Eksekusi biasanya terjadi apabila nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk membayar maupun mengangsur pembayaran terhadap bank syariah, sehingga bank tersebut meminta

¹¹ Mardani, *Hukum Acara Perdata dan Mahkamah Syariah*, Sinar Grafika. Jakarta, 200 h. 142

bantuan kepada pihak Pengadilan Agama untuk memberikan peringatan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, bila sampai tiga kali nasabah tidak menghiraukan peringatan tersebut, maka proses permohonan eksekusi yang harus dijalankan agar nasabah mau membayar semua hutang-hutang maupun tanggungan pada bank syariah tersebut.¹² Bila melalui jalur Pengadilan Negeri pihak yang menang dalam perkara harus mengajukan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, setelah adanya permohonan itu Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah untuk diberikan peringatan (*aanmaning*) agar yang bersangkutan melaksanakan bunyi putusan secara sukarela.¹³

Eksekusi di bawah tangan pimpinan Ketua Pengadilan sebelum melaksanakan eksekusi Ketua Pengadilan Agama terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditunjukkan kepada panitera atau juru sita untuk melaksanakan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama yang berwenang mengeksekusikan adalah Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan tersebut atau Pengadilan agama yang diberi delegasi wewenang oleh Pengadilan Agama yang memutusnya.

¹² Wawancara dengan Zainul Hidayah selaku wakil panitera muda di Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 25 Oktober 2010.

¹³ Ismet Baswedan, *Hukum Acara Perdata Peradilan Umum*, Unair Press. Surabaya, h. 64

1.5.6 Sita Eksekusi atau Penyitaan Eksekusi (*Executorial Beslaag*)

Penyitaan ini bertujuan untuk menjamin agar putusan pengadilan dapat dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Bila ada barang-barang yang telah disita dan pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi dengan sukarela, maka barang-barang yang telah disita akan dijual atau dilelang dan hasilnya dipergunakan untuk memenuhi putusan pengadilan.

Upaya hukum Penyitaan ini bertujuan supaya pihak tergugat selama pemeriksaan perkara tidak dapat menghindari dari putusan perkara dengan cara memindahkan atau menyembunyikan barang atau harta bendanya. Harta benda atau barang yang disita itu tidak dapat dipindah tangankan atau dijual, kecuali atas ijin pengadilan.¹⁴

Sita eksekusi merupakan sita yang dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan putusan, yakni sita yang dilakukan setelah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga sita tersebut dinyatakan sah dan berharga bila sudah ada penetapan Pengadilan Agama.¹⁵

1.5.7 Hak Tanggungan

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang

¹⁴ *Ibid*, h.49

¹⁵ Mardani, *op.cit* h. 124

berkaitan dengan tanah, definisi Hak Tanggungan adalah sebagai berikut :

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah Hak Jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasas Pokok Agraria, berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada *kreditur-kreditur* tertentu terhadap *kreditur-kreditur* lainnya.¹⁶

1.5.8 Eksekusi Hak Tanggungan

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, mengenai Eksekusi Hak Tanggungan, berbunyi sebagai berikut :

- 1) Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan :
 - a) Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 , atau
 - b) *Title eksekutorial* yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditur-kreditur lainnya.
- 2) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.
- 3) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan di umumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar

¹⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan. Jakarta, 2004, hlm 158

di daerah yang bersangkutan dan media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.

- 4) Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) batal demi hukum.
- 5) Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan.¹⁷

1.5.9 Debitur

Pengertian Debitur menurut Pasal 1 ayat (18) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.¹⁸

1.5.10 Kreditur

Pengertian Kredit menurut Pasal 1 ayat (11) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pengertian dari Kreditur sendiri adalah Orang atau lembaga keuangan (Bank) yang menyediakan uang maupun bentuk pinjaman lainnya berdasarkan

¹⁷ *Ibid*, h 167.

¹⁸ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung. 2000, h. 86

Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain.¹⁹

1.6.11 Akta Akad Jual Beli *Al Murabaha*

Menurut Pasal 1 ayat (9) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah, definisi dari Murabaha, berbunyi sebagai berikut :

Murabaha adalah Perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana Bank Syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah dan nasabah.²⁰

Murabaha juga bisa diartikan sebagai jual beli atau pertukaran harta dengan harta lainnya, berdasarkan ketentuan syariah yang mempergunakan uang sebagian alat atau media pertukaran.

Menurut Pasal 19 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, definisi dari akad murabaha, berbunyi sebagai berikut :

Definisi dari “Akad murabahah” adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

¹⁹ *Ibid* h. 85

²⁰ H. Ahmad Kanil, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 299

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundangan, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama yaitu Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²¹

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif analisis. Dalam artian penelitian ini diharapkan mampu melukiskan gambaran secara sistematis, terperinci dan menyeluruh tentang ***“Kewenangan Peradilan Agama Sidoarjo dalam menangani permohonan Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya”***. Dalam hal ini pembahasan analisis mengenai ruang lingkup ekonomi syariah dimaksudkan untuk dapat memperoleh pembahasan tentang pokok permasalahan yang ada di Pengadilan Agama mengenai Ekonomi Syariah.

Jadi dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian menggunakan penelitian hukum deskriptif analisis.

²¹ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 30

1.6.2 Pendekatan Masalah

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.²²

1.6.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder adalah data dari penelitian kepustakaan di mana dalam data sekunder terdiri dari 2 (dua) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah di Amandemen I, II, III, IV.
 - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
 - c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

²² *Ibid.*

- d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum.
 - f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - g) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil karya sarjana untuk memperluas wawasan penulis mengenai bidang penulisan.
- 1) Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika. Jakarta, 2004.
 - 2) Ahmad, Kanil. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*. Kencana. Jakarta, 2007.
 - 3) Boedi, Harsono. *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004.
 - 4) Burharuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Graha Ilmu. Yogyakarta, 2010.

- 5) Chariruman, Pasaribu. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika. Jakarta, 2004.
- 6) Cik, Basir. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Kencana. Jakarta, 2009.
- 7) Ismet, Baswedan. *Hukum Acara Perdata Peradilan Umum*, Unair Press. Surabaya, 2004.
- 8) Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- 9) R.Soesilo, *RIB/HIR*, Politeia. Bogor, 1995.
- 10) Sentosa, Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju. Bandung, 2000.
- 11) Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika. Jakarta, 2004.
- 12) Sulistyono, *Handout Mengenai Azas Peradilan Agama, mata kuliah Hukum Pearadilan Agama*. Surabaya, 2009.
- 13) Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Pres. Jakarta, 2007.
- 14) Team Media, *Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 tahun 1989 dan Kompilsasi Hukum Isalam Di Indonesia*, Media Centre

15) Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta, 2009.

16) Zainudin, Ali. *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika. Jakarta, 2006.

1.6.4 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan, perolehan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan dikumpulkan dengan cara mencari dan mempelajari serta memahami buku-buku ilmiah yang memuat pendapat beberapa sarjana.

Selain itu, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi ini juga dikumpulkan, bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan tersebut selanjutnya akan dilakukan penyuntingan bahan hukum, pengklasifikasian bahan hukum yang relevan dan penguraian secara sistematis.

1.6.5 Metode Analisis Data

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka penulisan skripsi ini menggunakan metode *content analysis*, yaitu metode yang menganalisis data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif, yang memanfaatkan peraturan perundang-undangan sebagai hal umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Selanjutnya

dibahas, disusun, diuraikan, dan ditafsirkan, serta dikaji permasalahan sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini nantinya disusun dalam empat bab. Tiap-tiap bab dibagi beberapa subbab yang saling mendukung. Bab-bab yang tersusun tersebut nantinya merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain.

Bab I, Pendahuluan Didalamnya terdiri dari tujuh sub bab yaitu sub bab pertama menguraikan tentang latar belakang masalah, kemudian sub bab kedua menguraikan tentang perumusan masalah. Selanjutnya di sub bab ketiga disajikan tujuan dan sub bab keempat mengenai manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Pada bagian sub bab kelima mengenai kajian pustaka yang merupakan landasan dari penulisan skripsi. Kemudian diuraikan beberapa konsep definisi yang berkaitan dengan judul penelitian. Selanjutnya sub bab keenam diuraikan tentang metode penelitian yang merupakan salah satu syarat dalam setiap penelitian. Intinya mengemukakan tentang tipe penelitian dan pendekatan masalah, sumber bahan hukum, langkah penelitian, dan sub bab ketujuh merupakan sub bab terakhir ini dakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II, menguraikan tentang Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah secara umum dalam bab ini terdapat delapan sub bab yakni yang pertama mengenai ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama dalam Bidang Bank Syariah meliputi semua perkara perbankan syariah di bidang perdata, sub bab yang kedua tentang sub bab kedua mengenai Sengketa Antara Bank Syariah dengan Pihak Non-Islam, sub bab ketiga membahas tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Arbitrase, sub bab keempat mengenai asuransi syariah, sub bab kelima mengenai pasar modal syariah, sub bab keenam mengenai reksa dana syariah, sub bab ketujuh membahas tentang pengaduan syariah, dan sub bab yang terakhir mengenai dana pensiun.

Bab III, Menguraikan tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam Pelaksanaan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan dalam bab ini terdapat enam sub bab yang terdiri dari yang pertama mengenai prinsip-prinsip operasional bank syariah, sub bab kedua membahas tentang kegiatan usaha bank umum syariah, sub bab ketiga mengenai kegiatan yang dilarang bagi bank syariah, sub bab keempat membahas tentang bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, sub bab kelima mengenai pembiayaan dalam perbankan syariah dengan menggunakan prinsip jual beli, sub bab yang terakhir membahas tentang penerapan UU No. 21 Tahun 2008 dalam permohonan eksekusi hak tanggungan.

Bab IV, berdasarkan uraian-uraian dalam bab II dan bab III diatas tentang jawaban dari rumusan masalah yang dijadikan obyek penulisan, selanjutnya di Bab IV merupakan Bab penutup yang terdiri dari dua sub bab yaitu sub bab pertama mengenai kesimpulan dan sub bab kedua membahas tentang saran.